

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rilke Jeffri Huwae
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Bahlil Lahadalia
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2026 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

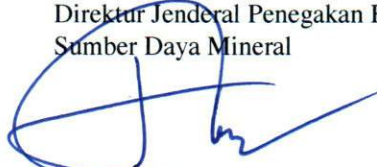
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, dan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan
Sumber Daya Mineral


Rilke Jeffri Huwae



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	TARGET 2026
1	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	1. Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM (Skala 10) (Indeks)	6,7
2	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Gakum yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang ber AKHLAK, dan ASN yang Profesional	1. Indeks Tata Kelola Birokrasi (Skala 100) (Indeks)	87,33

Total Anggaran Rp70.000.000.000

(Tujuh Puluh Miliar Rupiah)

Program

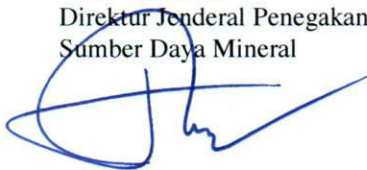
1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Jakarta, 30 Desember 2025

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Bahli Lahadalia

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan
Sumber Daya Mineral


Rilke Jeffri Huwae

